

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA MANAJEMEN SEKOLAH DASAR
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
(STUDI KASUS DI SD 2 KRETEK BANTUL)

Disusun Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) di
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Universitas Alma Ata



Oleh :
ADE SOFIANA
131200088

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Ade Sofiana : Analisis Terhadap Problematika Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SD 2 Kretek). Skripsi. Program Strata Satu. Universitas Alma Ata.

Penelitian berawal dari adanya problematika yang terjadi dalam manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek ; menemukan problematika terkait manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek ; kemudian berupaya mengatasi problematika dengan diselenggarakannya manajemen sekolah yang ideal untuk diterapkan di SD 2 Kretek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yang berusaha melakukan kajian yang mendalam tentang suatu peristiwa di lingkungan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, Pelaksanaan manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek terlaksana dengan baik pada beberapa aspek, tetapi pada aspek lain terdapat beberapa pelaksanaan yang kurang baik. Pada pelaksanaan manajemen yang kurang baik tersebut berpotensi menjadi problematika dan menghambat dalam proses penyelenggaraan terkait kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, kebijakan sekolah dan perhatian orang tua. *Kedua*, problematika yang terjadi dalam manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah kualifikasi guru tentang inklusi rendah, guru tidak membuat PPI, GPK hanya datang 2 hari, perhatian ABK kurang, Terbatasnya anggaran untuk menyediakan sarana prasarana ABK, pengawas dinas tidak memahami pendidikan inklusi, kebijakan sekolah terhadap ABK. *Ketiga*, Berdasarkan penyelenggaraan yang masih banyak mengalami problematika, maka sangat perlu dilakukan solusi dan langkah perbaikan dengan merancang sebuah manajemen yang ideal. dengan terselenggaranya manajemen sekolah yang ideal maka manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik

Kata kunci : Manajemen sekolah, Sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi

ABSTRACT

Ade Sofiana: Analysis of School Management Problematic Providers of Inclusive Education (Case Study at SD 2 Kretek). Essay. Program Strata One. University of Alma Ata.

The research begins with the problems that occur in elementary school management of inclusive education providers in SD 2 Kretek. This study aims to determine the implementation of primary school management of inclusive education providers in SD Kretek 2; Find problems related to primary school management of inclusive education providers in SD 2 Kretek; Then attempted to solve the problematics by holding an ideal school management to be implemented in SD 2 Kretek.

The method used in this research is qualitative research with case study research design that try to do deep study about an event in certain environment. Data collection techniques used interviews, documentation and observation.

The results showed: First, the implementation of elementary school management of inclusive education providers in SD 2 Kretek already partially implemented well there is also the implementation is not good. In the implementation of poor management has the potential to become problematic and hampered in the implementation process related to curriculum, educator, infrastructure, financing, school policy and parental attention. Second, the problems that occur in the school management of inclusive education providers are teachers' qualifications of low inclusion, teachers do not make PPI, GPK only come 2 days, less crew attention, limited budget to provide ABK infrastructure facilities, supervisors do not understand inclusive education, school policy Against ABK. Third, Based on the implementation of a lot of problematic, it is necessary to do solutions and improvement steps by designing an ideal management. With the implementation of ideal school management, the school management of inclusive education can run well

Keywords: Management, elementary school of inclusive education providers.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap insan. Semua berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, adil, bermutu tanpa memandang adanya perbedaan. Sekolah merupakan suatu lembaga yang memfasilitasi terjadinya proses pendidikan. Unsur yang terdapat dalam sekolah yakni kurikulum, sarana prasarana, guru sebagai pendidik, siswa sebagai yang memperoleh pendidikan dan lain sebagainya.

Fakta yang terjadi di lapangan sampai saat ini, terdapat beberapa kelompok penyandang disabilitas atau kecacatan yang kurang mendapat perhatian. Masyarakat berargumen bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, memiliki kebutuhan yang berbeda dan khusus dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, mereka harus ditempatkan dalam sekolah khusus dengan anak-anak yang mempunyai keadaan serupa. Hal ini jelas membuat diskriminasi serta *labeling* untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, karena tidak memberikan kesempatan bagi anak normal dengan ABK untuk berinteraksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan inklusi yang diselenggarakan dalam suatu sekolah umum dimaksudkan untuk memberi solusi,

terhadap adanya perlakuan diskriminatif dalam upaya pelayanan pendidikan, yang terpokok bagi anak-anak yang menyandang kecacatan atau anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Hal ini sesuai dengan Permendiknas RI No.70 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan bahwa :

“Pendidikan inklusi merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya.”¹

Berdasarkan pada surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tahun 2014, Sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) di Kabupaten Bantul kurang lebih berjumlah 41 unit sekolah yang terletak di 16 kecamatan.

Selama ini, aspek pengelolaan sekolah terkait pendidikan inklusi di

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No.70 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pendidikan Inklusi.

Kabupaten Bantul pada tingkat pendidikan dasar masih banyak yang belum mendapatkan perhatian yang serius sehingga terdapat beberapa komponen sistem sekolah penyelenggara pendidikan inklusi kurang berfungsi dengan baik. Masalah ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Bantul, Totok Sudarto. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Bantul berdasarkan surat keputusan (SK) dari pemerintah masih banyak masalah dalam pengelolaan salah satunya terkait dengan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus atau GPK. Meskipun jumlah penyelenggara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi relatif banyak, tetapi Totok mengakui jika pihaknya tak memiliki GPK yang cukup untuk semua sekolah.²

Kurangnya perhatian tentang manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dari pemerintah sendiri berdampak terhadap problematika internal pendidikan inklusi di suatu sekolah. Hal ini terlihat dari beberapa kesenjangan yang terjadi setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di SD 2 Kretek. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SD 2 Kretek yang bernama

Sukirmanta. Senada dengan ungkapan Totok Sudarto selaku kepala Dikdas Bantul bahwa pada tahun 2015 masih banyak kendala terkait dengan pengelolaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sukirmanta juga mengakui bahwa ketidaksiapan sekolah menjalankan pendidikan inklusi berdampak pada manajemen di sekolahnya yang masih menemui banyak kendala seperti, kurangnya tenaga pendidik khusus yang bertugas menangani dan mendidik ABK di setiap kelas, belum tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk ABK, Kurikulum yang masih disamakan dengan siswa reguler, sedangkan setiap ABK memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan dengan siswa reguler. Rendahnya kualitas pelatihan kependidikan inklusi terhadap guru reguler. Hal itu berdampak pada penanganan ABK dikelas kurang mendapat perhatian. Guru pendamping khusus yang ada di SD 2 Kretek hanya 1 Guru dengan jumlah siswa ABK yang berjumlah 32 siswa dalam 1 sekolah yang tersebar di setiap kelas.³

Tanpa adanya manajemen yang baik terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidak mungkin tujuan pendidikan

²Arief Junianto, *Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala*, www. HarianJogja.com 10 April 2015 (ONLINE) Diakses pada hari Senin, 20 Desember 2016 pukul 14.15.

³ Sukirmanta, Kepala Sekolah SD 2 Kretek, Wawancara tanggal 16 Desember 2016 pukul 9.45.

inklusi dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Akan terdapat beberapa problematika yang akan terjadi jika pengelolaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidak tertangani dengan baik.

KAJIAN TEORI

Manajemen Sekolah Dasar

Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi merupakan suatu proses pengaturan sumber daya melalui fungsi manajemen terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi.⁴

Bidang garapan manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi

a. Manajemen peserta didik

Perencanaan yang harus dilakukan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang terpokok yaitu terkait penerimaan peserta didik baru yang seharusnya memberikan kesempatan bagi semua anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dalam sekolah

penyelenggara pendidikan inklusi terdekat.⁵

Pada proses pengorganisasian kelompok belajar siswa kedalam kelas harus memahami berbagai kebutuhan siswa.⁶ Upaya untuk mencermati terkait latar belakang siswa, potensi serta kondisi khusus yang ada pada siswa, sekolah perlu mengadakan asesmen ada dua jenis asesmen yang dilakukan yakni : asesmen fungsional dan asesmen klinis.

Proses pelaksanaan pembelajaran yang tidak lain adalah melakukan pemberdayaan siswa melalui interaksi perilaku guru dan perilaku siswa ABK maupun siswa reguler, baik diruang maupun diluar kelas hal yang baru.⁷ Hal tersebut sangat sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas inklusi.

Proses evaluasi yang dilakukan guru pada siswa yang telah melaksanakan proses pembelajaran dapat dilakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran kemudian mengadakan tindak lanjut hasil penilaian

⁴ Ina Rosilawati, *Trik Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta : Familia, 2013), hlm. 11

⁵ *Ibid.*, hal.

⁶ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 82

⁷ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah...*, hlm 171

agar kompetensi yang ditargetkan tercapai.⁸

b. Manajemen kurikulum

Menurut Sri Minarni, fungsi kegiatan manajemen kurikulum yang terdapat disekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pembinaan dan evaluasi yang memiliki tujuan agar semua proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat dan berdaya guna untuk dunia pendidikan⁹

Proses perencanaan meliputi menganalisis kompetensi dasar untuk ABK. Selanjutnya, menyusun rencana program pembelajaran dan menyusun program pembelajaran individual, serta penyusunan alat instrument evaluasinya.

Perencanaan pengembangan kurikulum yang mengacu pada kurikulum 2013 yang berpedoman pada prinsip – prinsip sebagai berikut : relevansi, praktis dan fungsional, fleksibilitas, berorientasi pada peserta didik, integratif, program kompensatoris, efektif dan efisien.¹⁰

Fungsi pelaksanaan ini termasuk didalamnya kegiatan pengorganisasian

dan pengawasan oleh kepala sekolah yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian tugas khusus yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran.¹¹

Desain kurikulum bagi ABK disekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus mempertimbangkan 2 hal pokok, yakni karakteristik serta kebutuhan anak tersebut. Pelaksanaan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah menggunakan 3 model kurikulum, yaitu kurikulum umum, kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasikan.¹²

Evaluasi kurikulum dapat dilaksanakan dengan model CIPP (*Context, Input, Process dan Product*). Model ini bertitik tolak pada keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik dan kebutuhan peserta didik, lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program.¹³

⁸ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 125

⁹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah....*, hlm. 95.

¹⁰ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 84.

¹¹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah....*, hlm. 97.

¹² *Ibid.*, hlm. 97.

¹³ *Ibid.*, hlm. 103.

c. Manajemen tenaga kependidikan

Proses perencanaan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi yaitu mempersiapkan pengadaan tenaga pendidik yang berkompeten, salah satunya yaitu tersedianya guru pendamping khusus.¹⁴ Guru pendamping khusus atau GPK merupakan guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus dari pendidikan luar biasa atau guru yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan inklusi. Tugas GPK yakni berada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Pengorganisasian tenaga pendidik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi meliputi : guru umum, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus yang mempunyai tugas khusus untuk membimbing dan mendampingi proses belajar anak berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan tugas utama seorang guru. Kegiatan pembelajaran dalam kelas inklusi merupakan interaksi edukatif antara siswa reguler, ABK dan guru. pada proses pembelajaran ditandai dengan adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media, metode,

strategi dan sumber belajar.¹⁵ Guru sebagai bagian dari manajemen sekolah akan terlibat langsung dalam upaya mewujudkan kinerja yang baik maka dari itu di perlukan adanya penilaian kinerja.

d. Manajemen sarana dan prasarana

ABK

Perencanaan dalam manajemen sarana prasarana yaitu melakukan upaya analisis kebutuhan yang memberikan pertimbangan fungsi sarana prasarana secara berkelanjutan.¹⁶

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarpras disekolah. Penggunaan sarana harus mengacu pada analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Sarana prasarana harus didistribusikan sesuai dengan keperluan sekolah.

Inventarisasi atau pencatatan sarana prasarana di tulis dalam buku induk barang inventaris beserta kondisi sarpras tersebut. Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dilakukan rutin dengan tujuan untuk pencegahan dalam meminimalisir kerusakan.

¹⁴ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 86.

¹⁵ Barnawi, *Kinerja Guru Profesional...*, hlm. 25.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

Hal tersebut dilakukan demi mengoptimalkan fungsi manajemen dengan baik agar pembelajaran di sekolah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.¹⁷

e. Manajemen pembiayaan / pendanaan

Perencanaan setiap kegiatan yang di sekolah memerlukan biaya, termasuk dengan pelaksanaan pendidikan inklusi, perlu di alokasikan dana khusus untuk keperluan seperti : kegiatan identifikasi input siswa, modifikasi kurikulum, pelatihan tenaga kependidikan khusus yang terlibat, pengadaan sarana prasarana, pemberdayaan peran serta masyarakat inklusi, dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Pelaksanaan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, *Non Government Organization* (NGO), sumber dana dari luar negeri.¹⁸

Pada pelaksanaan manajemen pembiayaan atau keuangan terdapat juga fungsi pengorganisasian dan pengawasan yang menganut asas pemisahan tugas antara fungsi : 1) Otorisator; 2) Ordonator; 3) Bendaharawan.

Evaluasi manajemen keuangan bertujuan untuk terselenggaranya pembiayaan sekolah secara efektif.

f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat dilakukan sebagai penghubung kebutuhan antara sekolah dan masyarakat itu sendiri. Sekolah mengadakan komunikasi dengan masyarakat agar memahami kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat.¹⁹

Peran serta masyarakat menjadi salah satu penanggung jawab pendidikan inklusi yakni sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, sebagai pendukung, baik itu finansial, sumbangsih pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat di sekolah.²⁰

Hal-hal yang dilakukan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pemberdayaan pendidikan inklusi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 269.

¹⁸ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 96.

¹⁹ Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 28.

²⁰ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 99.

dilingkungan yakni dengan cara memberitahu masyarakat tentang program program sekolah terutama pendidikan inklusi, baik program yang akan dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan maupun program yang belum dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang detail tentang sekolah tersebut.²¹

KERANGKA BERFIKIR



Gambar 1. Kerangka berfikir

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, bahwa terdapat beberapa problematika dalam manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi. Lebih jauh tentang

problematika tersebut, peneliti berusaha mengaitkan dan mengkaji masalah dengan teori fungsi manajemen. Analisis dilakukan terhadap beberapa komponen dalam penyelenggaraan manajemen sekolah yang diantaranya tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, keuangan, hubungan masyarakat sehingga didapat solusi yang tepat. Solusi tersebut berdampak terhadap terciptanya manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian pendekatan studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada satu fenomena yang jadikan pokok dasar serta akan dipahami secara lebih detail. Desain penelitian studi kasus merupakan kajian yang mendalam tentang suatu kejadian atau peristiwa di lingkungan dan situasi tertentu dengan tujuan untuk mengungkapkan dan memahami suatu perihal.²² Peneliti menggunakan desain studi kasus dikarenakan hendak mengangkat fenomena yang terjadi di Sekolah Dasar 2 Kretek yaitu terkait dengan masalah masalah manajemen

²¹ Ina Rosilawati, *Trik Bimbingan dan Konseling ...*, hlm. 17.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet.ke 15, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 300.

yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tersebut. Obyek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai problematika yang terjadi pada manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Subjek dalam penelitian ini yakni orang-orang yang berkompeten dan mempunyai wewenang dalam bidang manajemen pendidikan inklusi di SD 2 Kretek.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan *purposive sampling*, peneliti memilih sampel dengan kriteria dan kebutuhan tertentu.²³ Dalam proses penelitian yang berlangsung terdapat beberapa teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diperoleh hasil terhadap analisis problematika manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi dengan melihat beberapa bidang garapan manajemen sekolah seperti manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, manajemen pembiayaan, manajemen sarana prasarana

dan manajemen hubungan masyarakat. Semua bidang garapan manajemen tersebut dilaksanakan dengan acuan pada fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. Hasil penelitian dilakukan dengan berbagai teknik seperti wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Manajemen kurikulum

Perencanaan yang dilakukan di SD 2 Kretek dalam pengembangan kurikulum, antara lain menjabarkan silabus kemudian membuat RPP. Perangkat kurikulum pembelajaran pendidikan inklusi yang ada di SD 2 Kretek dikembangkan masih sama secara umum. diklat pelatihan yang dilakukan tentang perangkat pembelajaran ABK masih sangat jarang dilaksanakan di SD 2 Kretek, terakhir diadakan pada tahun 2007.

Pengorganisasian kurikulum di SD 2 Kretek mengacu pada pembagian peran fungsi kepada semua yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang mempunyai wewenang penuh dan berperan sebagai pemberi arahan terhadap guru yang

²³ *Ibid.*, hlm . 301.

melaksanakan pengembangan kurikulum atau rencana pembelajaran yang akan dibuat.

Guru kelas dan Guru pendamping khusus tidak membuat rencana program pembelajaran individual (PPI) untuk melakukan pembelajaran terhadap ABK. Guru pendamping khusus hanya merujuk pada proses pembelajaran yang dibuat oleh guru kelas.

Kurikulum yang ada di SD 2 Kretek dilakukan pengawasan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dari UPT PPD Kecamatan Kretek yang diadakan paling tidak setiap semester dengan dilakukan supervisi terhadap perangkat kurikulum, administrasi maupun proses pembelajaran. Pengawas yang ditugaskan untuk melakukan supervisi masih sangat umum, belum berusaha menyentuh permasalahan inklusi yang terjadi di SD 2 Kretek.

Evaluasi kurikulum di SD 2 Kretek dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan untuk memperbaiki kinerja, khususnya untuk mengetahui sejauh mana pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang akan dicapai. Hasil dari evaluasi tersebut dijadikan bahan koreksi guru dan pihak yang terlibat untuk memperbaiki perencanaan yang telah dirancang.

Manajemen peserta didik

Perencanaan peserta didik yang dilakukan pertama pada SD 2 Kretek yakni terkait dengan sistem penerimaan peserta didik untuk siswa reguler maupun ABK. Penerimaan peserta didik di SD 2 Kretek antara siswa reguler dengan siswa ABK diberlakukan sama. Sekolah menerima semua anak tanpa memandang latar belakang. Penerimaan peserta didik dilihat berdasarkan umur, bukan berdasar pada seleksi tes maupun nilai.

Pengorganisasian peserta didik baru ABK ditempatkan secara bersama-sama dengan siswa reguler dalam satu kelas.

Pelaksanaan

Assesmen melalui tes psikologi dan IQ oleh ahli psikologi yang bekerja sama dengan SLB 1 Bantul untuk mengetahui siswa yang tergolong diatas rata rata atau ABK. Hasil tes tersebut di jadikan guru dan pihak sekolah sebagai pijakan untuk memberi perlakuan dan tindak lanjut terhadap ABK tersebut.

Evaluasi yang dilakukan dalam melakukan proses pemberdayaan potensi ABK dalam kegiatan pembelajaran yaitu dilakukan sama seperti siswa reguler. Materi pelajaran dan kriteria ketuntasan minimal sama dengan siswa reguler.

Manajemen tenaga pendidik :

Perencanaan yang dilaksanakan pada tenaga pendidik di SD 2 Kretek khususnya untuk penyelenggaraan inklusi yakni dengan melibatkan langsung guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus merupakan guru dinas yang didatangkan dari Sekolah luar biasa atau SLB. Jumlah guru pendamping khusus yang ada di SD 2 Kretek hanya 1, sesuai dengan keputusan dinas. Jadwal mengajar guru pendamping khusus di SD 2 Kretek hanya datang pada hari jumat dan sabtu.

Sekolah mempunyai tenaga pendidik antara lain guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus. Guru kelas bertugas untuk melakukan proses pembelajaran. Guru mata pelajaran hanya mengajar mata pelajaran yang ahli dibidangnya sedangkan guru pendamping khusus atau GPK bertugas untuk melakukan bimbingan belajar kepada ABK

Pelaksanaan manajemen tenaga pendidik di SD 2 Kretek dilihat dari kinerja guru yang telah melaksanakan tugas sebagai pendidik yang salah satunya yakni membuat rencana pembelajaran kemudian melaksanakan pembelajaran.

Manajemen sarana prasarana

Perencanaan dalam manajemen sarana prasarana yang dilaksanakan SD 2 Kretek masih sama dengan sekolah umum dan hanya mengacu pada kebutuhan siswa reguler. Sekolah hanya sebatas menyediakan akses jalan untuk ABK penyandang difabel. Sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti media pembelajaran di kelas inklusi belum tersedia.

Semua sarana prasarana di SD 2 Kretek dilakukan inventarisasi dengan mendata semua kondisi dan jumlah ruang klas, gedung, sarana ibadah, ruang tamu, ruang kepala sekolah, kantor guru, taman, perpustakaan dan kamar mandi. Temuan ini diperkuat oleh hasil dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti dari pihak sekolah. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan secara rutin oleh warga sekolah dengan kegiatan bergotong royong membersihkan dan merawat sarana prasarana sekolah.

Manajemen keuangan

Pengelolaan keuangan di SD 2 Kretek tidak tersedia anggaran khusus untuk menyelenggara kan pendidikan inklusi. Anggaran dari pemerintah tersebut hanya sebatas unuk kepentingan sekolah secara umum sedangkan untuk melaksanakan pendidikan khusus seperti penyediaan sarana

prasarana, diklat pendidikan khusus untuk guru reguler dan penyediaan guru pendamping khusus yang cukup, saat ini belum tersedia.

Manajemen hubungan masyarakat

Perencanaan yang dilaksanakan di SD 2 Kretek Masyarakat dalam melibatkan masyarakat atau orang tua murid yaitu dengan sosialisasi tentang program - program yang akan diselenggarakan sekolah. Sejauh ini program yang disosialisasikan kepada orangtua seluruh siswa belum mencakup tentang pendidikan Inklusi, hanya sekedar program umum sekolah. program kunjungan guru ke rumah siswa dan *sharing* kepada orang tua tentang perkembangan belajar siswa di sekolah. Sebelum Ujian Nasional yang diikuti oleh kelas 6 guru dan orang tua ABK mengadakan pertemuan guna membahas tentang keikutsertaan ABK.

Pelaksanaan pada proses pertemuan yang diadakan orang tua ABK kelas 6, guru dan kepala sekolah tersebut masih mengalami banyak kendala seperti pihak orang tua yang keberatan dengan kebijakan yang di putuskan oleh sekolah untuk tidak mengikutsertakan ABK dalam UN. Sekolah mengambil langkah tersebut karena mempertimbangkan berbagai hal demi

memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak.

PEMBAHASAN

Manajemen Sekolah Dasar

Penyelenggara Pendidikan Inklusi di SD

2 Kretek

Pelaksanaan manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek sejauh ini dilaksanakan dengan baik pada beberapa aspek, tetapi pada aspek lain terdapat beberapa pelaksanaan yang kurang baik.

Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang pelaksanaannya sudah baik yaitu terkait dengan penerimaan siswa baru yang diberlakukan sama antara ABK dan siswa reguler, penerimaan siswa diseleksi berdasarkan umur yang ideal yaitu 7 tahun. Hal ini juga sesuai dengan hasil dokumentasi berupa peraturan kepala dinas pendidikan dasar kabupaten Bantul tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Dalam peraturan dinas tersebut menyebutkan salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam penerimaan siswa yaitu untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi baik SD dan SMP harus menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus dan siswa reguler. Khusus untuk sekolah dasar

syarat yang digunakan yakni umur harus 7 tahun, jika kuota belum terpenuhi maka boleh menerima siswa yang berumur 6 tahun.²⁴ Hal ini berlaku untuk semua siswa.

Siswa baru yang memiliki kebutuhan khusus dan siswa baru reguler setelah melakukan pembelajaran beberapa bulan kemudian dilakukan asesmen untuk mengetahui hambatan apa yang dimiliki siswa. Asesmen tersebut dilakukan oleh tenaga ahli profesional yang berasal dari *Voluntas In Psychologia* Yogyakarta yakni sebuah lembaga psikologi yang dapat mengetahui tingkat kecerdasan siswa melalui tes potensi akademik.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dadang Garnida yakni salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang, potensi, dan solusi penanganan siswa berkebutuhan khusus melalui asesmen. Asesmen tersebut dilakukan dapat dengan dua jenis yakni asesmen fungsional dan assessment klinis yang biasa dilakukan oleh ahli psikologis maupun tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidang pendidikan khusus.²⁵

Pengorganisasian dalam program kegiatan peserta didik yakni adalah

pembagian kelas. ABK dan siswa reguler ditempatkan dalam satu ruangan. Hal ini telah sesuai dengan hakikat sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu sendiri yakni semua siswa normal maupun siswa yang memiliki kebutuhan khusus mental maupun fisik diberlakukan sama dalam satu ruang kelas dan mendapatkan pendidikan yang sama.

Interaksi antara siswa reguler dan ABK terjalin dengan baik dalam satu ruangan kelas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. ABK merasa lebih dihargai jika berada dalam satu kelas bersama - sama dengan teman sebayanya tanpa adanya *labeling*. Hal yang selama ini terjadi di masyarakat yakni siswa yang memiliki kebutuhan khusus dan bersekolah di SLB mendapat perlakuan diskriminatif di lingkungannya.

Menurut Sunaryo dalam bukunya Munif Chatib juga menyatakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sebuah sistem layanan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan lingkungan, yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus serta anak normal agar bisa ditempatkan dikelas reguler dan dapat

²⁴ Dokumentasi Tentang Prosedur
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusi

²⁵ Dadang Garnida., *Pengantar Pendidikan
Inklusi...*, hlm. 82.

belajar bersama teman-teman sebayanya tanpa adanya diskriminasi.²⁶

Pelaksanaan manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang belum baik diterapkan di SD 2 Kretek Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang pelaksanaannya belum baik salah satunya yaitu terkait dengan pengembangan kurikulum yang ada di sekolah terkait dengan penyelenggara pendidikan inklusi. Perangkat kurikulum seperti Silabus dan RPP masih dirancang seperti umum serta tidak ada perbedaan antara kurikulum sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan sekolah non inklusi. Perencanaan pengembangan kurikulum dirancang salah satunya yakni sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi. Guru kelas dan guru pendamping khusus tidak merancang program pembelajaran individual khusus untuk ABK. Pada proses pembelajaran yang terjadi pada kelas inklusi, ABK belum tertangani dengan baik. Pemberdayaan ABK belum sepenuhnya mendapatkan perhatian oleh guru kelas. Peran GPK yang belum maksimal, membuat pelaksanaan pembelajaran juga berjalan kurang baik. Guru hampir tidak pernah mendapatkan

diklat pelatihan tentang pendidikan khusus. Proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas belum menyentuh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari efektif belum terlaksana dengan maksimal.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek belum memiliki sarana prasarana khusus yang lengkap untuk menunjang pembelajaran siswa reguler maupun ABK. Terbatasnya dana yang tersedia untuk menunjang kebutuhan ABK. Pelaksanaan manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang kurang sesuai juga terlihat dengan dilaksanakannya kebijakan sekolah untuk tidak mengikutsertakan ABK dalam Ujian Nasional.

Problematika Manajemen Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi di SD 2 Kretek

Berdasarkan pelaksanaan manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek terdapat beberapa proses yang pelaksanaannya kurang sesuai dan menjadikan sebuah problematika serta hambatan dalam kelembagaan, salah satunya yaitu pada proses pengembangan kurikulum khusus untuk ABK masih dirancang secara

²⁶ Munif Chatib, *Sekolah Anak - Anak Juara ...*, hlm. 33

umum. Berdasarkan hasil dokumentasi, RPP yang dibuat guru kelas dirancang masih secara umum dan tidak ada perbedaan yang terlihat antara rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada kelas inklusi maupun non inklusi. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru terhadap perencanaan pembelajaran untuk ABK.

Minimnya kualifikasi guru tentang pendidikan khusus juga menjadi salah satu alasan guru belum paham untuk membuat perencanaan pembelajaran ABK. Hal ini disebabkan oleh latar belakang guru yang mayoritas sarjana pendidikan sekolah dasar tetapi tidak pernah mendapatkan mata kuliah serta pelatihan tentang pendidikan khusus. Diklat dan pelatihan tentang kurikulum khusus dari pemerintah maupun dari intern sekolah selama ini juga tidak pernah terselenggara. Pelaksanaan diklat tentang pendidikan inklusi di SD 2 Kretek terakhir dilaksanakan oleh guru kelas / guru umum yaitu sekitar tahun 2007 dan sekarang sangat jarang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah tentang pelatihan pendidikan inklusi.

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari efektif belum terlaksana dengan maksimal. Sehingga pemberdayaan siswa kurang baik. Persoalan tersebut dikarenakan Guru pendamping

khusus yang diutus oleh dinas untuk melakukan bimbingan dan pendampingan belajar hanya datang seminggu dua kali pada hari jum'at dan sabtu, sedangkan hari efektif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas inklusi adalah enam hari dari hari senin sampai hari sabtu. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh kepala sekolah, guru kelas dan guru pendamping khusus yang sama-sama menyatakan bahwa guru pendamping khusus hanya datang ke sekolah pada hari jumat dan sabtu untuk melakukan bimbingan belajar terhadap ABK. Persoalan tersebut juga menjadi masalah untuk semua guru yang memiliki ABK dalam setiap kelas. Peran guru kelas dirasa belum maksimal dalam melayani kebutuhan ABK dikarenakan GPK dalam 2 hari tersebut harus berpindah - pindah kelas dalam melakukan bimbingan terhadap semua ABK yang ada di setiap kelas. Pada saat pembelajaran selain hari jumat dan sabtu guru kelas sering merasa kesulitan untuk mengelola dan membimbing ABK.

Persoalan lain yaitu datang dari orang tua siswa ABK kelas 6 yang sebagian protes dengan kebijakan yang ditetapkan di sekolah. Hal ini terjadi karena kebijakan sekolah yang tidak mengikutsertakan ABK

dalam Ujian Nasional menuai komentar dari Orang tua. Satu hari sebelum UN dilaksanakan, pihak sekolah mengadakan rapat bersama dengan orangtua ABK yang menyatakan bahwa siswa ABK tidak bisa ikut UN dan nantinya tidak akan mendapatkan ijazah dari SD. Keputusan ini juga di sertai dengan surat pernyataan oleh orang tua bahwa suatu saat nanti orang tua tidak berhak menyalahkan pihak sekolah terhadap masalah kelulusan siswa karena sebelumnya telah diadakan perjanjian bermaterai.

Sarana dan prasarana khusus untuk ABK belum tersedia di SD 2 Kretek. Hal ini dikarenakan minimnya biaya yang tersedia. Selama ini pihak sekolah hanya memiliki dana yang bersumber dari pemerintah dinas provinsi. Anggaran khusus hanya disediakan untuk menggaji guru dan pelayanan assesmen untuk siswa. Belum ada anggaran khusus yang menyediakan sarana prasarana fisik seperti layanan alat bantu belajar untuk ABK.

Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang Ideal Untuk SD 2 Kretek

Hasil temuan dari SD 2 Kretek menyatakan masalah utama yang dihadapi sekolah yakni tentang ketidaksiapan sekolah

melaksanakan pendidikan inklusi dikarenakan terdapat beberapa komponen yang kurang mendukung seperti tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, terbatasnya dana serta kurangnya kepedulian dari orang tua.

Manajemen kurikulum di SD 2 Kretek belum menerapkan kurikulum yang sesuai dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kurikulum yang dirancang sekolah masih sebatas untuk siswa reguler. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi merupakan sebuah sekolah yang memiliki siswa didik normal dan siswa didik yang memiliki kebutuhan khusus, maka dari itu dalam rencana penanganannya pun harus dilakukan dengan khusus. ABK harus dilihat terlebih dahulu tingkat kebutuhan dan hambatan yang dialami kemudian melakukan modifikasi terhadap beberapa komponen dalam pembelajaran seperti perencanaan pembelajaran, materi, media, metode yang digunakan dan lain sebagainya. Pihak sekolah sebaiknya melihat jenis pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Menurut Dadang Garnida pengelolaan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan dengan cara modifikasi

kurikulum yang berlaku pada sekolah reguler yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ABK, menyusun persiapan pembelajaran, menyusun pembagian tugas mengajar, melakukan pembelajaran di kelas inklusi, melakukan evaluasi.²⁷ Model pengembangan kurikulum tersebut ada tiga jenis yang pertama yaitu kurikulum sekolah reguler hal ini di peruntukkan bagi ABK yang masih bisa mengikuti kurikulum umum, yang kedua kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi, kurikulum ini perpaduan antara kurikulum umum dan kurikulum individual. ABK dapat belajar bersama dikelas menggunakan kurikulum ini dalam format pembelajaran individual. Ketiga yaitu kurikulum individual dalam format pembelajaran individual.

Modifikasi kurikulum dilakukan dengan cara melihat kebutuhan siswa kemudian guru merancang program pembelajaran individual untuk satu orang ABK. Pada tataran pengembangan kurikulum di SD 2 Kretek masih menggunakan kurikulum umum seperti sekolah non inklusi, padahal sekolah penyelenggara pendidikan inklusi merupakan sekolah yang terdapat ABK di

dalamnya. Sekolah harus melihat kebutuhan siswa khususnya ABK. Pengembangan kurikulum yang dilakukan di SD 2 Kretek hendaknya dilakukan dengan tahap perencanaan pengembangan kurikulum yang memperhatikan aspek pengembangan kurikulum pendidikan khusus yang mengacu pada kurikulum 2013 yang berpedoman pada prinsip – prinsip sebagai berikut : Relevansi, praktis dan fungsional, fleksibilitas, berorientasi pada peserta didik, integratif, program kompensatoris, efektif dan efisien.²⁸

Pembagian tugas antara guru kelas dengan guru pendamping khusus yang dilakukan di SD 2 Kretek belum maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan tugas yang harus dijalankan guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Guru seharusnya melakukan beberapa tugas yang dilakukan guna menunjang pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan. Dadang Garnida menyebutkan salah satu tugas guru kelas dalam sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk merancang kurikulum pendidikan adalah menyusun dan melakukan assesmen mengetahui kebutuhan anak, menyusun program pembelajaran individual

²⁷ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 84

²⁸ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi...*, hlm. 84

(PPI) bersama-sama dengan guru pembimbing khusus.²⁹

Tugas guru pendamping khusus yakni untuk menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran, membuat sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua siswa, melaksanakan program pendampingan siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus pada proses kegiatan pembelajaran bersama - sama dengan guru kelas atau guru mapel, memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat beberapa catatan khusus untuk anak berkebutuhan khusus selama terlibat dalam pembelajaran, untuk mempermudah dipahami jika ada pergantian guru, saling bertukar informasi dan pengalaman antara guru³⁰

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara kepada kepala sekolah menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dari semua bidang garapan sekolah masih dilakukan secara umum layaknya sekolah reguler, belum menyentuh permasalahan yang terkait dengan pendidikan inklusi hal ini dikarenakan kepala sekolah yang baru dan juga belum paham terkait dengan

penyelenggaraan inklusi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala sekolah bahwa pengawas dari pihak UPT Kecamatan juga tidak memahami tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Persoalan ini dapat diatasi salah satunya dengan cara meminta rekomendasi kepada dikpora provinsi untuk menghadirkan pengawas dari SLB sehingga mempunyai kualifikasi yang sesuai untuk melakukan pembinaan dan evaluasi permasalahan yang ada di SD 2 Kretek.

Sejauh itu, untuk penggunaan model evaluasi yang digunakan idealnya untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu dengan model CIPP (*Context, Input, Process dan Product*). Hal ini dikarenakan pada model CIPP tersebut dapat bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program, sarana yang digunakan, serta prosedur pelaksanaan pendidikan inklusi.³¹ Menurut peneliti, hal ini ideal jika diterapkan di SD 2 Kretek karena pada tahapan ini sekolah melakukan evaluasi tentang latar belakang dan situasi yang akan mempengaruhi perkembangan program pendidikan inklusi tersebut, kemudian dalam input tersebut

²⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 88.

³¹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah...*, hlm. 102

berhubungan dengan fasilitas, yang disediakan untuk siswa reguler dan ABK, perencanaan dan materi pembelajaran yang dikembangkan berpusat pada kebutuhan ABK dan siswa reguler. Pada proses tersebut menuntut pelaksanaan yang nyata pada pelaksanaan program pembelajaran yang akhirnya menghasilkan produk yang dicapai oleh program pendidikan, mencakup jangka panjang dan jangka pendek.

KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian teoritis dan analisis data berdasarkan temuan di Lapangan, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek. Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang pelaksanaannya sudah baik yaitu: a) sistem penerimaan siswa sudah tidak ada perbedaan perlakuan, b) proses penilaian psikologi siswa sudah melibatkan psikolog c) sudah ada sistem pengorganisasian kelas yang baik d) Sarana prasarana umum sudah tersedia dengan baik, e) program sekolah melalui kunjungan di rumah orang tua siswa. Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan

inklusi yang pelaksanaannya belum baik salah satunya yaitu a) RPP masih dirancang umum, berpusat pada siswa reguler dan tidak membuat pembelajaran individual untuk ABK b) ABK kurang mendapatkan perhatian, perhatian lebih berpusat pada siswa reguler c) GPK tidak hadir setiap hari d) Tidak ada diklat pelatihan tentang pendidikan khusus untuk guru e) guru umum tidak paham dalam menangani ABK, perhatian lebih berpusat pada siswa reguler e) Proses pengawasan belum baik f) Belum tersedianya sarana prasarana khusus untuk ABK, g) Terbatasnya dana yang tersedia, h) ABK tidak mendapat ijazah

2. Problematika Manajemen Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi di SD 2 Kretek. Problematika yang terjadi yakni terkait dengan kurikulum yang dirancang masih seperti umum hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki guru dalam merancang kurikulum khusus untuk ABK. Beban guru yang dirasa terlalu banyak juga menjadi salah satu faktor guru tidak membuat

pembelajaran individual. Pembinaan ABK dalam pembelajaran belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan guru pendamping khusus yang bertugas membimbing ABK hanya datang 2 kali dalam seminggu. Terbatasnya anggaran untuk menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk ABK. Pengawas dinas yang tidak memahami pengelolaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kurangnya perhatian orang tua ABK. ABK tidak bisa mengikuti UN karena kemampuan yang rendah sehingga tidak dapat ijazah. Beberapa problematika diatas yang selama ini terjadi di SD 2 Kretek menjadi penghambat terhadap proses pelaksanaan manajemen sekolah yang ideal untuk diselenggarakan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

3. Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang ideal diterapkan di SD 2 Kretek. Pelaksanaan manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang ideal yakni menuntut pada pelaksanaan yang belum sesuai menuju pelaksanaan yang sesuai dan

tepat. Upaya terhadap pelaksanaan manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang ideal yakni dengan melihat dari beberapa aspek yang sesuai dengan kebutuhan SD 2 Kretek dalam melaksanakannya dan melihat kemampuan sumberdaya yang ada di sekolah tersebut. Problematika yang paling utama dalam manajemen di SD 2 Kretek yaitu minimnya kualifikasi guru terkait dengan pendidikan khusus yang menuntut dilakukannya perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi. Solusi yang dapat dilaksanakan yakni, pihak sekolah dapat melakukan kerjasama dengan mahasiswa atau lembaga lain dalam bidang psikologi ataupun dalam bidang pendidikan khusus untuk memberikan diklat atau workshop guna memberikan ilmu terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tepat. Hal ini juga menunjang pengetahuan guru untuk membuat rencana pembelajaran di kelas inklusi dengan tepat. Problematika lain berasal dari sarana prasarana yang kurang memadai dalam melakukan pembelajaran di kelas

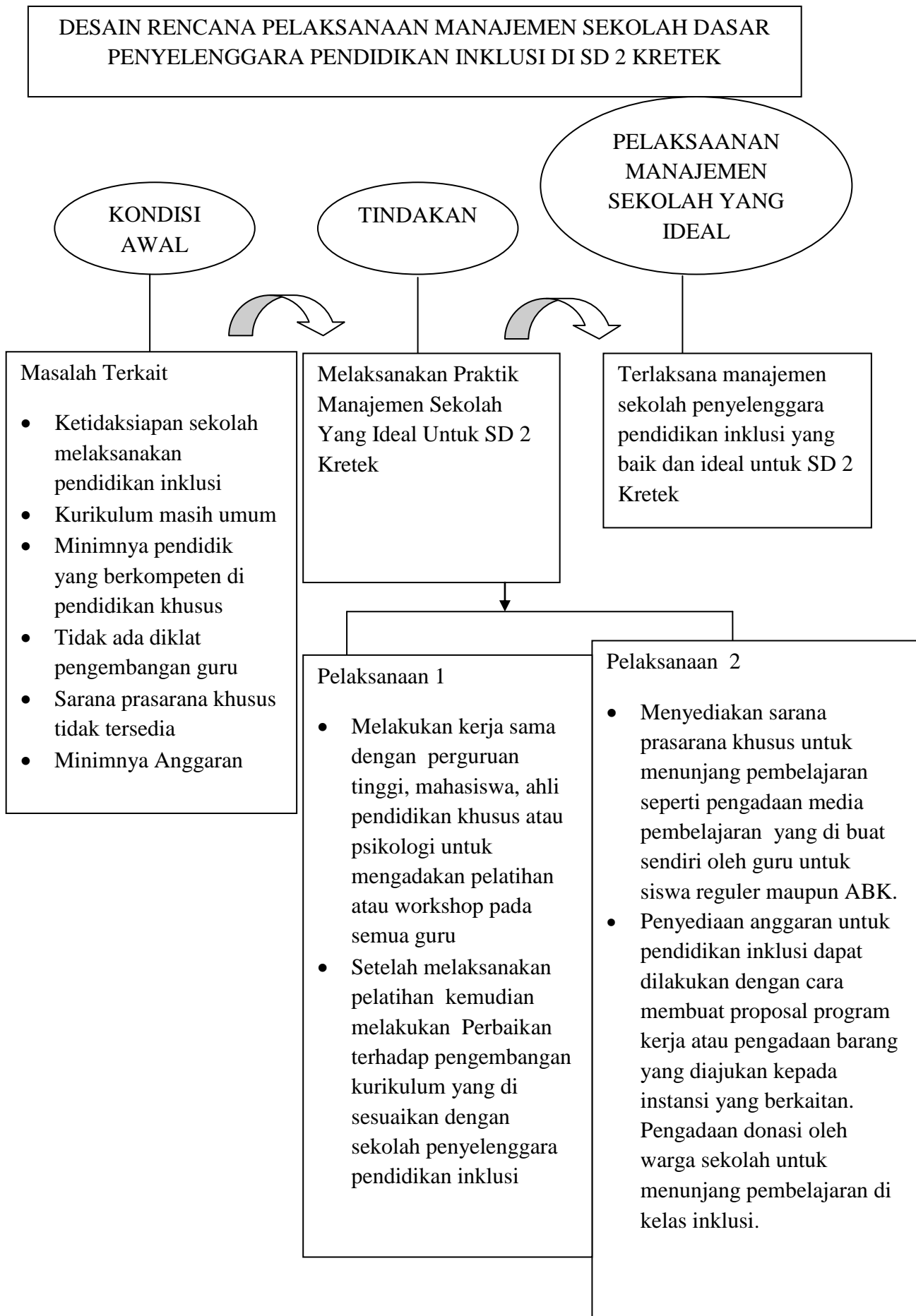
inklusi. Guru dapat membuat media pembelajaran sederhana untuk menunjang pembelajaran di kelas inklusi dengan memperhatikan karakteristik siswa. Anggaran yang minim dapat dilakukan dengan cara lain, pihak sekolah membuat proposal pengadaan barang atau program kegiatan yang diajukan kepada lembaga yang terkait. Pengadaan pembiayaan dalam menunjang pendidikan inklusi dapat dilakukan dengan pengumpulan donasi oleh warga sekolah SD 2 Kretek.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah :

1. Bagi sekolah
Perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap manajemen sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di SD 2 Kretek.
2. Bagi pemerintah
Perlunya membuat kebijakan yang sesuai dengan permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah.
3. Bagi universitas
Perlunya mahasiswa diberikan matakuliah tentang pendidikan khusus atau pendidikan inklusi.

Gambar 4.1. Desain Rencana Pelaksanaan Manajemen Sekolah Yang Ideal



- Afin Murtie. 2012. *Ensiklopedi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta : Pustaka Alfabet
- Ahmad Baedowi. 2012. *Calak Edu 2 Esai-Esai Pendidikan*. Jakarta : Pustaka Alfabet.
- _____. 2015. *Potret Pendidikan Kita*. Jakarta : Pustaka Alfabeta.
- Ahmad Salim. 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah*. Jogjakarta : Sabda Media
- _____. 2012. Urgensi Manajemen Pendidik Lembaga Pendidikan Anak. dalam Literasi. Jurnal Pendidikan. Vol. III, No. Yogyakarta
- Arief Junianto, *Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala* , www. Harianjogja.com 10 April 2015 (ONLINE) Diakses pada hari Senin, 20 Desember 2016
- Andang. 2012 . *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jogjakarta : Ar Ruzz
- Ardhi Widjaya. 2012. *Memahami Anak Tuna Rungu*. Jogjakarta : Familia.
- Budiyanto, dkk. 2012. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar* Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar
- Basilus R.Werang. 2015. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta : Media Akademi.
- Dadang Garnida. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusi*. Bandung : Refika.
- Dwi Rakhamawati dan Wahyu Tirani. 2013. *Konsep Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi Yang Humanis*. Yogyakarta : Familia.
- Hermanto. 2010. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah. : Jurnal Pendidikan Khusus, Vol 6 No. 2. Yogyakarta.
- Ina Rosilawati. 2013. *Trik Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta : Familia.
- Is Kartini. 2013. *Membangun Karakter Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusi*. Hamemayu : Buletin BPKB DIY. No. 1. Vol. 3. Yogyakarta
- J.David Smith. 2009. *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung : Nuansa
- Jarinem, Guru Pendamping Khusus SD 2 Kretek, Wawancara tanggal 19 Mei 2017

- Muhaimin. 2009. *Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta : Kencana
- Mohammad Takdir Ilahi. 2013. *Pendidikan Inklusi dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media.
- Munif Chatib. 2012. *Sekolah Anak - Anak Juara : Berbasis Kecerdasan Jamak Dan Pendidikan Berkeadilan*. Bandung : Mizan
- Nini subini. 2014. *Pengembangan Pendidikan Inklusi Berbasis Potensi*. Jogjakarta : Maxima
- Meita Shanty. 2012. *Strategi Belajar Khusus Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Jogjakarta : Familia
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya.
- Nanang Fattah. 2008. *Landasan Manejemen Pendidikan*, Bandung ; Remaja Rosda Karya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No.70 Thn 2009 Pasal 1
- Prim Masrokan Mutohar. 2013. *Manajemen Mutu Sekolah*. Jogjakarta : Ar Ruzz Media
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : AlfaBeta.
- Syafaruddin Anzizhan. 2008. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta : Grasindo
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* Jakarta : Raja Grafindo Persada.